

Implikasi Pasal 86 Statuta Roma Terhadap Kewajiban Negara Anggota

(Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin dari ICC)

Muhammad Ardan Royanto¹, Dian Khoreanita Pratiwi²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: ardanmuh00@gmail.com

Abstrak: Dugaan deportasi anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia mendorong ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah dikeluarkannya surat tersebut sejumlah pihak mengkritik dan menolak untuk melaksanakan surat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan mengetahui apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari aspek dugaan kejahatan yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan Statuta Roma sebagai bahan hukum primer dan perjanjian internasional yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 86 memberikan kewajiban bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, meskipun negara bisa saja menolak apabila dengan alasan keamanan nasional. Sulitnya pelaksanaan surat tersebut sehingga memerlukan adanya amandemen yang mengatur mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara. Selanjutnya, surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan dugaan kejahatan yang terjadi memiliki bukti yang cukup dan adanya keyakinan dari jaksa sehingga surat tersebut sah, akan tetapi diperlukan upaya memberi kesempatan pada Pemerintah Rusia untuk menjelaskan duduk

perkara agar dapat mencapai kesepakatan mengenai pengembalian anak-anak tersebut.

Kata Kunci: *Kewajiban Negara Anggota, Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, Statuta Roma 1998.*

Abstract: *Allegations of the deportation of children in Ukraine by the Russian Government prompted the ICC to issue an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. After issuing the arrest warrant, a number of parties criticized it and refused to carry out the arrest warrant. This study aims to find out how Article 86 of the Rome Statute is disclosed regarding the obligations of member states in implementing the arrest warrant against President Vladimir Putin and whether the arrest warrant is in accordance with the specific provisions of the alleged crimes committed. This type of research is juridical-normative research using the Rome Statute as the main legal material and international agreements related to research. The conclusion of this study shows that Article 86 provides an obligation to ICC member states to carry out arrest warrants, although states may refuse if for reasons of national security. It is difficult to implement the arrest warrant so that it requires an amendment that regulates the implementation of arrest warrants against heads of state. Furthermore, the arrest warrant is in accordance with the provisions and the alleged violation that occurred has sufficient evidence and there is confidence that the arrest warrant is valid, but efforts are needed to give the Russian Government an opportunity to explain the situation so that the case can reach an agreement regarding the return of the children.*

Keywords: *Obligations of States parties, Arrest of Warrant Against Vladimir Putin, Rome Statute 1998.*

A. Pendahuluan

Interntional Criminal Court (ICC) merupakan peradilan yang berdiri sendiri berbeda dengan *International Court of Justice* (ICJ) yang merupakan organ hukum utama PBB, perbedaan yang paling mudah diidentifikasi antara ICC dengan ICJ adalah ICJ mengadili negara sedangkan ICJ mengadili individu.²⁹⁰ ICC dibentuk berdasarkan

290 Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman, (2017), *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 169-170

konferensi yang dilangsungkan di Roma yang dikenal dengan istilah Statuta Roma 1998.²⁹¹ Konferensi tersebut diselenggarakan setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi no 51/207 tahun 1966 dan Resolusi no 52/160 tahun 1977 yang disebut dengan *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* mengenai pembentukan ICC yang diadakan dari tanggal 15 Juli hingga 17 Juli 1998 yang berlokasi di kota Roma, Italia.²⁹² ICC memiliki posisi sebagai organisasi internasional pertama pada bidang peradilan atau yudikatif, berbeda dengan peradilan internasional sebelumnya ICC memiliki sifat yang berdiri sendiri berbeda dengan ICJ yang merupakan bagian dari PBB.²⁹³

Yurisdiksi ICC sebagaimana Pasal 5 ayat (1) adalah kejahatan yang paling serius yang terdiri dari 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²⁹⁴ Pembentukan ICC dilatarbelakangi munculnya pemikiran mengenai pentingnya pembentukan lembaga peradilan seperti ICTY dan ICTR namun bukan pengadilan yang bersifat *ad hoc* melainkan bersifat permanen. Selain itu juga diharapkan pengadilan yang tidak terikat dari kepentingan pihak manapun dan intervensi politik internasional, mengagungkan kedaulatan negara, dan bersifat idenpenden, dan berlaku adil tidak hanya pada korban namun juga pada pelaku kejahatan.²⁹⁵ Dengan terbentuknya ICC, maka hal tersebut dianggap sebagai penyempurnaan keberadaan hukum pidana internasional.²⁹⁶ ICC dapat menjalankan yurisdiksinya

291 Marfuatul Latifah, 2014, *Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia*, Politica, Vol. 5, No. 2, hlm. 159, [10.22212/jp.v5i2.341](https://doi.org/10.22212/jp.v5i2.341).

292 Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, hlm. 290-291.

293 Hikmahanto Juwana, *Mahkamah Pidana Internasional*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 11, hlm. 70-71, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.8>.

294 Pasal (5) Ayat 1 Statuta Roma 1998

295 Koalisi Masyarakat untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008, *Kertas Kerja Indonesia menuju Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional*, hlm. 7.

296 Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2019, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 228, <https://doi.org/>

apabila suatu kasus yang merupakan yurisdiksi ICC tidak dapat diadili oleh Pengadilan Nasional baik dikarenakan ketidakinginan (*unwilling*) ataupun ketidakmampuan (*unable*) untuk mengadili kasus tersebut.²⁹⁷

Pecahnya Invasi yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia terhadap beberapa wilayah di Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 menarik perhatian negara-negara di dunia, yang mana pada awal invasi tersebut muncul adanya dugaan Deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia. Tindakan deportasi pada awalnya muncul pada wilayah di Eropa, yang mana praktik deportasi di Eropa merupakan pemindahan penjahat ke wilayah lain.²⁹⁸ Deportasi merupakan permasalahan yang cukup serius, sebuah negara dalam melakukan deportasi cenderung dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negerinya.²⁹⁹ Invasi dan dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia di Ukraina selanjutnya mendorong 43 negara anggota ICC untuk merujuk situasi di Ukraina kepada ICC, selanjutnya ICC melakukan investigasi atas dasar rujukan tersebut. Satu tahun setelah investigasi yang dilakukan oleh ICC Kamar Prapersidangan II ICC mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada dua pejabat Rusia yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada 17 Maret 2023.³⁰⁰

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut Rusia memberikan responnya yang mana melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak berlandasan dan batal secara hukum.³⁰¹ Respon dari negara-negara anggota ICC memunculkan dua kubu yang memilih

[org/10.23887/jatayu.v2i3.28787](https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787).

297 Didi Prasatya, 2013, *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed.1, Vol. 1, hlm. 1.

298 Varda Oktavia Ramdani et al., 2022, *Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 3, No.2, hlm. 81.

299 Tony Mirwanto, 2020, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Abdimas Imigrasi, Vol. 1, No. 2, hlm. 83, <https://doi.org/10.52617/jaim.v1i2.139>.

300 <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.30 WIB.

301 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64998316>, diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.39 WIB.

untuk tunduk dan menolak tunduk menangkap Presiden Putin apabila berada di wilayahnya yang memicu perdebatan bahkan dalam kalangan internal beberapa negara di dunia. Jerman dan Brazil diketahui sebagai anggota ICC yang memilih tunduk, sementara Hungaria memilih untuk menolak, dan Afrika Selatan mengisyaratkan akan mengambil sikap seperti Hungaria, hal ini mengingat hubungan baik Afrika Selatan dan Rusia dalam keanggotaan BRICS dan pada bulan Agustus mendatang Afrika Selatan mengundang Presiden Vladimir Putin sebagai Kepala Negara Rusia untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 yang diadakan di Durban, Afrika Selatan.³⁰²

Munculnya penolakan dari negara-negara anggota ICC tentunya hal ini bertentangan dengan Statuta Roma yang mana mewajibkan negara anggota ICC untuk berkerjasama dalam proses investigasi dan penuntutan yang menjadi yurisdiksi ICC tidak terkecuali surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mana hal itu merupakan bagian dari proses penuntutan yang dilakukan oleh ICC. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai apakah Surat Perintah Penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya terhadap dugaan kejahatan yang terjadi berupa Deportasi anak-anak di Ukraina.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yakni bagaimana implikasi pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan bagaimana keabsahan surat perintah penangkapan ICC dari aspek dugaan deportasi anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum.³⁰³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami mengapa

302 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230326070811-134-929376/daftar-anggota-icc-yang-bersedia-dan-tidak-untuk-tangkap-putin> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.47 WIB.

303 ainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

muncul sebuah perundang-undangan.³⁰⁴ Pendekatan kasus pada prinsipnya melakukan pemahaman dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi, hal ini sekaligus berguna untuk menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan kasus pada dasarnya menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.³⁰⁵ Pendekatan konsep muncul dengan adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, yaitu dengan memahami konsep doktrin yang ada dan mengkaitkan doktrin tersebut dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dapat menjadi argumentasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.³⁰⁶

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer diantaranya Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969, dan Konvensi Jenewa keempat 1949. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi-publikasi yang berkaitan tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi.³⁰⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta jurnal terkait baik di media cetak maupun digital. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka (*library research*) dan melakukan analisis berupa analisis deskriptif-kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keanggotaan *International Criminal Court*

Keanggotaan ICC telah bertambah setelah hampir 21 tahun berdiri. Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs resmi ICC, terdapat 123 negara dari seluruh dunia yang merupakan anggota ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma. Anggota ICC saat ini terdiri dari

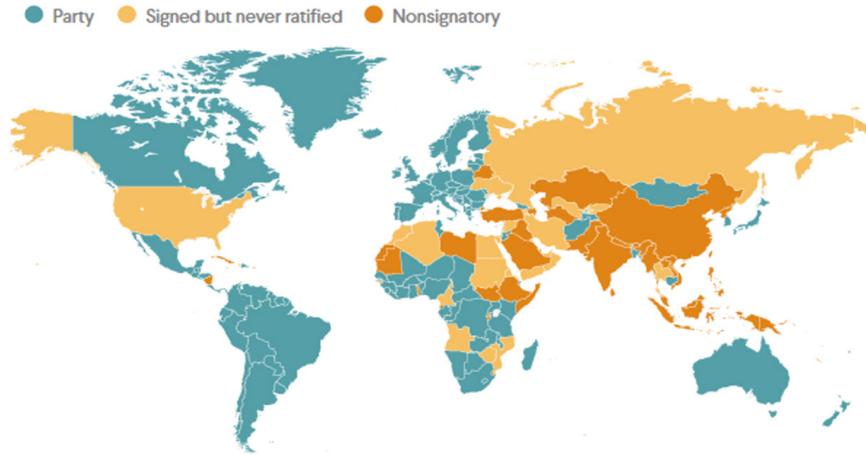
304 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm 142.

305 Ibid, hlm. 191.

306 Ibid, hlm 187.

307 Ibid, hlm. 54.

33 Negara-negara Afrika, 19 Negara-negara Asia-Pasifik, 18 Negara-negara Eropa Timur, 28 Negara Amerika Latin dan Karibia, dan 25 Negara-negara Eropa Barat dan Negara lainnya.³⁰⁸



Note: Burundi and the Philippines joined the ICC but later withdrew.

Sources: International Criminal Court; United Nations.

COUNCIL OF
FOREIGN
RELATIONS

Gambar 3.1 : Peta dunia Sebaran Keanggotaan ICC

Sumber : *International Criminal Court & United Nations, 2023*

Yurisdiksi ICC tidak hanya berlaku pada negara-negara anggota saja. Statuta Roma memungkinkan negara non-anggota untuk memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC tanpa harus meratifikasi Statuta Roma yang disebut dengan hak prerogatif dengan menandatangani sebuah Deklarasi penyerahan yurisdiksi. Ukraina merupakan salah satu negara yang telah menggunakan hak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 12 Ayat (3) Statuta Roma yang berbunyi *“If the acceptance of a State which is not a party to this Statute is required under paragraph 2, that state may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with the respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part”*.³⁰⁹

308 <https://asp.icc-cpi.int/states-parties> , diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 11.26 WIB.

309 Pasal 12 Ayat (3) Statuta Roma 1998

Berdasarkan pasal tersebut, Ukraina menandatangani Deklarasi yang dilakukan selama dua kali, yaitu:

a. Deklarasi pertama

Pada 9 April 2014 Ukraina menandatangani sebuah deklarasi yang menyerahkan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili kejahatan yang terjadi di Ukraina. Pokok dari deklarasi tersebut berbunyi:

"In conformity with Article 12, paragraph 3 of the Statute of the International Criminal Court, Ukraine hereby recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting Ukraine accepts the exercise of jurisdiction by the International Criminal Court on the basis of the D and judging the authors and accomplices of acts committed on the territory of Ukraine within the period 21 November 2013 – 22 February 2014.

Ukraine accepts the exercise of jurisdiction by the International Criminal Court on the basis of the Declaration of Verkhovna Rada of Ukraine (The Parliament of Ukraine). The Declaration came in force on 25 February 2014 and is made for an indeterminate duration. The Declaration along with its unofficial translation are annexed herewith..."

b. Deklarasi kedua

Setelah berakhirnya periode yurisdiksi ICC atas kejahatan yang terjadi di Ukraina berdasarkan deklarasi pertama, dugaan kejahatan tetap terjadi di Ukraina sejak 20 Februari 2014. Hal ini mendorong pemerintah Ukraina untuk mengajukan deklarasi kedua yang pada pokoknya berbunyi:

"...on behalf of the State of Ukraine I have the honour to declare that in conformity with Article 12, paragraph 3, of the Rome Statute on the International Criminal Court Ukraine accepts the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the perpetrators and accomplices of acts committed in the territory of Ukraine since 20 February 2014

This Declaration is made for an indefinite duration and will enter into force upon its signature".

2. Dugaan Kejahatan Perang Yang Dilakukan Pemerintah Rusia Terhadap Ukraina

a. Rujukan dari 43 negara anggota ICC

Pecahnya invasi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap beberapa wilayah di Ukraina memunculkan dugaan terjadinya kejahatan perang yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, hal tersebut mendorong sebanyak 43 negara anggota ICC untuk merujuk kasus tersebut kepada ICC untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Pada 2 maret 2022 rujukan tersebut menjadi dasar ICC dalam memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan pemerintah Rusia di Ukraina.³¹⁰

Rujukan tersebut ditujukan kepada Mr. Karim A.A. Khan selaku Jaksa penuntut umum ICC, terdapat 6 surat rujukan yang ditemukan, yaitu:

1. Rujukan dari Republik Lithuania
2. Rujukan dari kelompok 38 negara anggota ICC
3. Rujukan dari Jepang
4. Rujukan dari Makedonia Utara
5. Rujukan dari Montenegro
6. Rujukan dari Chili

Keenam surat rujukan tersebut pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk merujuk situasi di Ukraina kepada ICC untuk memulai investigasi yang mana setelah surat ini diterima ICC memulai penyelidikannya.

b. Laporan Komisi Penyelidik Internasional Independen tentang Ukraina No A/HRC/52/62

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Rights Council* (HRC) pada tanggal 4 Maret 2022 mengeluarkan sebuah resolusi nomor A/HRC/49/1 yang pada pokoknya membentuk sebuah komisi independen untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran baik pelanggaran HAM maupun pelanggaran hukum humaniter internasional, dan segala bentuk kejahatan yang terjadi di Ukraina yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Federasi Rusia.³¹¹ Federico Villegas

310 https://www-icc--cpi-int.translate.google/situations/ukraine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada tanggal 30 april 2023 pukul 15.14 WIB.

311 Human Rights Council, 2023, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, hlm. 2.

selaku Presiden HRC pada saat itu menunjuk tiga orang ahli di bidang hak asasi manusia sebagai anggota dari komisi independen tersebut, ketiga orang tersebut terdiri dari Erik Møse (Norwegia), Jasminka Džumhur (Bosnia dan Herzegovina) dan Pablo de Greiff (Kolombia). Komisi independen tersebut memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menganalisis bukti-bukti pelanggaran yang terjadi serta mengidentifikasi apabila ada kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap individu maupun entitas yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi di Ukraina.³¹²

Laporan tersebut menunjukkan beberapa dugaan pelanggaran oleh pemerintah Federasi Rusia pada saat invasi serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Laporan tersebut menyatakan bahwa terjadi perpindahan penduduk Ukraina pada saat invasi Rusia terhadap Ukraina terjadi secara masif yang terakhir kali terjadi di Eropa pada masa perang dunia ke-2. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melaporkan per tanggal 21 Februari 2023 terdapat sekitar delapan juta pengungsi dari Ukraina di seluruh Eropa yang mana 90 persen dari angka tersebut merupakan perempuan dan anak-anak.³¹³

Salah satu isi dari laporan itu berisikan laporan mengenai pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina oleh pemerintah Federasi Rusia secara ilegal. Pemerintah Ukraina dan Rusia telah menyatakan lebih sekitar ratusan ribu anak-anak Ukraina telah dipindahkan ke Rusia dari awal masa invasi yaitu tanggal 24 Februari 2022. Angka tersebut tidak dapat dipastikan karena terdapat variasi jumlah angka yang berbeda, namun hasil dari laporan tersebut menunjukkan angka sebanyak 16.221 anak-anak di Ukraina telah dideportasi oleh Pemerintah Rusia.³¹⁴ Jumlah tersebut telah bertambah melalui sumber yang digunakan per-tanggal 12 Mei 2023 yaitu berjumlah 19.393 anak.³¹⁵

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Presiden Vladimir Putin telah mengeluarkan kebijakan nomor 183 tentang penentuan

312 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/president-human-rights-council-appoints-members-investigative-body-ukraine> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 10.46 WIB.

313 Human Rights Council, Op.Cit, hlm. 4.

314 Ibid, hlm. 14.

315 <https://childrenofwar.gov.ua> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 11.03 WIB

untuk tujuan kemanusiaan kategori orang yang berhak mengajukan kewarganegaraan federasi Rusia dengan cara yang sederhana. Berdasarkan keputusan tersebut, maka setiap anak-anak tanpa pengasuhan orang tua yang ditinggalkan orang tua dan merupakan warga negara Ukraina, Donetsk, dan Luhansk akan mendapatkan kewarganegaraan Rusia dengan cara yang mudah.³¹⁶ Kebijakan Presiden Putin tersebut ditandatangani pada bulan Mei 2022 dan menjadi dugaan anak-anak yang dipindahkan ke Rusia telah diberikan kewarganegaraan Rusia.³¹⁷

c. Klaim Pemerintah Rusia

Vassily Nebenzia selaku perwakilan Rusia untuk PBB menyatakan bahwa tuduhan berupa dugaan deportasi anak-anak Ukraina oleh Pemerintah Rusia adalah hal yang tidak benar. Sebelum dikeluarkannya surat perintah penangkapan kepada Presiden Vladimir Putin, Nebenzia menyatakan Moskow telah berencana untuk menjelaskan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi atas dugaan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan pemindahan anak-anak tersebut beralasan untuk melindungi anak-anak tersebut agar terhindar dari zona perang dan tidak menjadi korban perang yang dilakukan oleh militer. Nebenzia menyatakan akan mengembalikan anak-anak yang dipindahkan tersebut apabila keadaan sudah kondusif.³¹⁸

Sebelum dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC atas dugaan kejahatan perang berupa deportasi anak-anak secara ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia pada tanggal 17 Maret 2023, Rusia telah berencana untuk melakukan pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB pada awal bulan April yang bertujuan untuk membahas mengenai fakta-fakta situasi yang terjadi di Ukraina khususnya mengenai anak-anak Ukraina yang dipindahkan ke wilayah Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Vassily Nebenzia melalui konferensi pers yang diadakan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023.³¹⁹

316 Decree of the President of the Russian Federation of 30 May 2022 No. 330 on Amendments to the Decree of the President of the Russian Federation dated 24 April 2019, No. 183 On Determining for Humanitarian Purposes the Categories of Persons Entitled to Apply for Citizenship of the Russian Federation in a Simplified Manner, article 1.

317 Human Rights Council, Op.Cit.

318 <https://www.voaindonesia.com/a/rusia-akan-gelar-pertemuan-pbb-untuk-bahas-anak-anak-ukraina-yang-dibawa-ke-rusia/7014204.html> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 16.24 WIB.

319 Ibid.

d. Klaim Pemerintah Ukraina

Pemerintah Ukraina menyatakan Rusia telah melakukan beberapa kejahatan perang salah satunya deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Daria Herasymchuk selaku Penasihat hak komisararis Presiden Ukraina untuk hak dan rehabilitasi anak menjelaskan bagaimana 5 cara Rusia membawa anak-anak tersebut, yaitu:³²⁰

1. Menawarkan keluarga di wilayah invasi untuk membawa anak-anak mereka berlibur di kamp anak-anak Rusia dan tidak mengembalikan mereka selama jangka waktu yang disepakati;
2. Mengambil anak-anak Ukraina dari panti asuhan;
3. Memisahkan anak-anak dari orangtuanya di pos filtrasi pada saat memasuki wilayah rusia;
4. Mencabut hak orang tua melalui hukum yang diberlakukan di wilayah pendudukan;
5. Mengambil anak-anak dalam kasus di mana mereka tinggal dengan orang dewasa lain setelah orang tua mereka terbunuh dalam perang.

Jaksa Ukraina Andriy Kostin menyatakan diperkirakan sebanyak lebih dari 16 ribu anak di Ukraina yang dideportasi secara ilegal, anak-anak tersebut diantaranya berasal dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kharkiv, dan Kherson yang menjadi wilayah invasi Rusia.³²¹

3. Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin Dari *International Criminal Court*

Berdasarkan rujukan dari 43 negara anggota ICC terhadap situasi di Ukraina, Jaksa penuntut umum yang dalam hal ini adalah Karim A.A. Khan memulai investigasi pada 2 Maret 2022 atas situasi yang terjadi di Ukraina. Satu tahun dan lima belas hari setelah investigasi yang dilakukan tepatnya pada 17 Maret 2023 Kamar pra-persidangan II ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua pejabat Federasi Rusia yaitu Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin dan Komisararis Hak Anak Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova.³²²

320 https://www-reuters-com.translate.goog/world/europe/who-are-ukrainian-children-heart-putin-arrest-warrant-2023-03-19/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 10.36.

321 Ibid.

322 <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine> , diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 14.50 WIB

a. Dasar hukum pengeluaran surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin oleh ICC

1. Pasal 8 (2) (a) (vii) dan Pasal 8 (2) (a) (viii)

Pasal tersebut menjelaskan mengenai kejahatan perang, yang mana ICC menduga Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova bertanggung jawab dan telah melakukan kejahatan perang sebagaimana poin vii dan viii pada Pasal 8 (2) (a) yaitu melakukan deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap anak-anak di Ukraina (vii) dan Menahan Sandra (vii).

2. Pasal 25 (3) (a)

“Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible”.

b. Pernyataan Hakim Presiden *International Criminal Court* Piotr Hofmanski

Melalui pernyataan yang diunggah pada media *youtube* dan situs resmi ICC, Hakim Presiden ICC Piotr Hofmanski menyatakan ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada dua pejabat Rusia yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova pada 17 Maret 2023. Pengeluaran surat tersebut berdasarkan dugaan kejahatan perang berupa deportasi anak-anak secara ilegal di beberapa wilayah di Ukraina ke dalam wilayah Federasi Rusia. Hofmanski menyatakan tindakan tersebut adalah tindakan yang dilarang oleh hukum internasional, yakni memindahkan warga sipil dari wilayah asli mereka. Selain itu, anak-anak yang dalam hal ini dideportasi merupakan subjek yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Selanjutnya Hakim-hakim ICC telah menerima bukti yang cukup dari Jaksa Penuntut dan telah menetapkan bahwa dugaan tersebut memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya. Pada akhir pernyataannya, Hofmanski menyatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan dari surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin tersebut memerlukan dukungan dari kerjasama antar negara-negara di dunia atau kerjasama internasional.³²³

323 <https://www.youtube.com/watch?v=6BUGwtvbqVY> , diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 15.50 WIB.

c. Pernyataan Jaksa Karim A. A. Khan KC

Melalui unggahan berita pada situs resmi ICC, Jaksa Karim A.A Khan mengajukan permohonan kepada Kamar Pra-Persidangan II ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan atas situasi yang terjadi di Ukraina. Pengeluaran surat tersebut ditujukan kepada dua orang yaitu Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, dan Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Beleva. Kantor Jaksa tersebut telah mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan Sidang Pra-Persidangan telah meyakini bahwa ada alasan yang masuk akal bahwa dua pejabat Rusia tersebut bertanggungjawab atas deportasi anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke wilayah Federasi Rusia, hal tersebut melanggar Pasal 8 (2) (b) (vii) dan Pasal 8 (2) (b) (viii) Statuta Roma.³²⁴

Kantor Jaksa Karim A.A Khan telah mengidentifikasi tindakan deportasi tersebut dimana tindakan tersebut dilakukan dengan mengambil anak-anak dari panti asuhan. Selain itu, terdapat juga anak-anak yang telah diadopsi oleh keluarga Rusia, perubahan Undang-Undang Rusia yang dikeluarkan oleh Presiden Vladimir Putin menyebabkan anak-anak tersebut dapat diberikan kewarganegaraan Rusia secara mudah, sehingga keluarga-keluarga Rusia dapat dengan mudah mengadopsi anak-anak tersebut. Tindakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan niat Rusia untuk secara permanen mengeluarkan anak-anak tersebut dari negara mereka sendiri. Anak-anak secara hukum internasional dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa ke-4.³²⁵

Jaksa Karim A.A Khan telah berbicara dengan *United Nations Security Council* atau Dewan Keamanan PBB dan menekankan bahwa penyelidikan terhadap dugaan deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal menjadi prioritas kantor-nya agar dapat memastikan para tersangka bertanggungjawab atas dugaan kejahatan dan anak-anak yang dideportasi dapat kembali dengan keluarga serta tempat tinggal mereka masing-masing. Jaksa Karim. A. A Khan menyatakan tidak akan ragu untuk melakukan permohonan lebih lanjut mengenai surat perintah penangkapan tersebut.³²⁶

324 <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 11.34 WIB.

325 Ibid.

326 Ibid.

d. Surat perintah penangkapan berdasarkan Statuta Roma 1998

Pasal 58 Statuta Roma menjadi dasar bagi ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1). Pengeluaran surat perintah penangkapan ini berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum yang telah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti maupun informasi lain dan telah yakin bahwa seseorang perlu ditangkap agar dapat diadili di ICC.³²⁷

1. Tujuan dikeluarkannya surat perintah penangkapan Berdasarkan Pasal 58 (1) (b) menyebutkan 3 tujuan mengapa surat perintah penangkapan perlu dikeluarkan, yaitu:
 - a. Untuk menjamin orang yang diduga melakukan kejahatan paling serius dapat hadir pada persidangan di ICC
 - b. Untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan, atau
 - c. Dimana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah dan yang timbul dari keadaan yang sama.
2. Syarat materil surat perintah penangkapan
Pasal 58 (3) Statuta Roma menunjukkan syarat materil suatu surat perintah penangkapan, yaitu:
 - a. Nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
 - b. Suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah untuk mana penahanan orang tersebut diupayakan; dan
 - c. Alasan mengapa penuntut umum percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Jangka waktu surat perintah penangkapan
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 (4) menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut berlaku sampai diputuskan oleh Mahkamah, namun pada surat perintah penangkapan Presiden Rusia Jaksa Karim . A.A. Khan mengatakan bahwa surat tersebut berlaku seumur hidup bahkan meskipun Vladimir Putin tidak lagi menjabat sebagai Presiden Rusia.

327 Pasal 58 Statuta Roma 1998

Statuta Roma juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat setiap negara yang telah meratifikasinya.

Meskipun Statuta Roma mewajibkan negara anggota untuk melaksanakan surat perintah penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 86, Statuta Roma juga mengatur mengenai kondisi dimana sebuah negara menyatakan penolakan untuk berkerjasama, hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 72 yaitu apabila berkaitan dengan keamanan nasional, sehingga apabila sebuah negara anggota ICC tidak ingin menangkap putin dengan alasan tidak memiliki kekuatan dan keberanian dan khawatir akan berdampak pada keamanan nasional mengingat Rusia juga memberikan pernyataan bahwa siapa saja yang berani untuk menangkap Presiden Vladimir Putin, hal tersebut akan menjadi deklarasi perang terhadap pihak yang bersangkutan. Tentunya ancaman tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara anggota ICC, khususnya negara yang tidak memiliki kekuatan. Pasal 93 Ayat (4) hingga Ayat (6) mengatur lebih lanjut bagaimana cara untuk menyampaikan penolakan yang seharusnya, yaitu :³²⁸

- a. Berdasarkan ayat (4) : Negara anggota dapat menolak memberikan bantuan untuk seluruhnya maupun sebagian apabila permintaan itu berkaitan dengan keamanan nasionalnya;
- b. Berdasarkan ayat (5) : Sebelum menolak untuk memberikan bantuan, negara yang menolak harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan atas kondisi tertentu, atau apakah bantuan tersebut dapat diberikan pada waktu tertentu atau dengan cara alternatif, dengan syarat Mahkamah atau Penuntut Umum telah menerima bantuan itu;
- c. Berdasarkan ayat (6) : Apabila suatu permintaan ditolak, negara yang menolak harus memberitahu Mahkamah atau Penuntut Umum mengenai apa alasan penolakan tersebut.

Selanjutnya Statuta Roma juga mengatur apabila negara gagal memenuhi permintaan untuk berkerjasama, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (7) yang berbunyi "*Where a State party fails to comply with a request to cooperate by the Court contrary to the provisions of this Statute, thereby preventing the Court from exercising its functions and power under this Statute, the Court may make a finding to that effect and refer the matter to the Assembly of*

328 Pasal 93 Ayat (4-6) Statuta Roma 1998.

States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security Council".³²⁹ Sehingga berdasarkan pasal tersebut apabila sebuah negara anggota ICC melakukan kegagalan ataupun menolak melaksanakan kewajibannya untuk menangkap Presiden Vladimir Putin apabila berada di wilayahnya, maka dalam hal ini ICC harus melaporkan hal tersebut kepada Majelis Negara Pihak karena berdasarkan situasi di Ukraina yang dirujuk oleh 43 negara pihak.

Meskipun penolakan terhadap surat perintah penangkapan memang dimungkinkan berdasarkan Statuta Roma, namun penolakan dan kritik yang dinyatakan oleh Hungaria, Afrika Selatan dan Serbia memiliki alasan yang tidak memenuhi persyaratan penolakan yaitu mengenai keamanan nasional sehingga penolakan untuk berkerjasama untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dari tiga negara tersebut adalah bentuk kegagalan sebagaimana yang diatur pada Pasal 87 Ayat (7). Permasalahan tersebut harus diatasi oleh Majelis Negara Pihak karena Situasi di Ukraina dirujuk oleh Majelis Negara Pihak, akan tetapi sebelum negara tersebut benar-benar gagal dalam arti ketika Presiden Vladimir Putin berada di wilayahnya dan tidak ada tindakan dari negara tersebut maka hal itu baru dapat dikatakan sebagai kegagalan.

Selanjutnya, bagaimana seharusnya negara-negara anggota ICC yang menolak menangkap putin agar tidak dinyatakan gagal atau melakukan pelanggaran terhadap Statuta Roma. Tentunya sebagaimana ketentuan Pasal 72 alasan keamanan nasional bisa menjadi alasan yang dapat diterima dan hal itu memerlukan adanya penyampaian kepada ICC atau penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat 4-6. Selain daripada penolakan berdasarkan keamanan nasional ada beberapa cara yang dapat dilakukan bagi negara yaitu dengan melakukan reservasi, penarikan diri, dan amandemen.

Dalam hukum perjanjian internasional dikenal istilah reservasi. Reservasi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara apabila memiliki keberatan terhadap salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian internasional. Reservasi dapat menjadi sebuah solusi untuk menjamin antara perjanjian internasional dengan hukum nasional tidak saling bertolak belakang dan perjanjian internasional tidak mengganggu keberadaan hukum nasional dan kedaulatan

329 Pasal 87 Ayat (7) Statuta Roma 1998.

sebuah negara, sehingga hal tersebut akan melahirkan perjanjian internasional yang saling melengkapi kepentingan nasional dan masyarakat internasional.³³⁰ Dalam hal ini, sebenarnya negara-negara yang menolak untuk menangkap Putin tetap dapat menjadi bagian dari ICC dengan cara melakukan reservasi terhadap Pasal 86. Hal ini secara hukum dapat mengecualikan negara tersebut untuk tunduk dalam proses penuntutan, sehingga surat perintah penangkapan yang merupakan bagian dari penuntutan ICC secara otomatis juga tidak mewajibkan negara yang telah melakukan reservasi, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Statuta Roma tidak memungkinkan adanya reservasi sebagaimana ketentuan Pasal 120 yang berbunyi “*No reservations may be made to this Statute*”.³³¹

Ketidakungkinan untuk reservasi, menyebabkan apabila memang sebuah negara merasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hal yang dapat dilakukan selain reservasi adalah penarikan diri. Hal ini sebagaimana pernyataan Afrika Selatan melalui Presidennya yang menyatakan akan menarik diri dari Statuta Roma, hal tersebut serupa dengan pengajuan untuk menarik diri dari Afrika Selatan sebelumnya pada saat Afrika Selatan menolak untuk menangkap Presiden Omar Al-Bashir pada tahun 2015 saat kunjungan Al-Bashir ke Afrika Selatan. Pasal 127 ayat (1) Statuta Roma memungkinkan penarikan diri yang menyatakan negara pihak dapat mengeluarkan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Sekjen PBB untuk menarik diri dari Statuta Roma. Penarikan tersebut berlaku satu tahun setelah penarikan tersebut diterima, namun pada pasal 127 ayat (2) menyatakan sebuah negara tidak dapat menarik diri berdasarkan penolakan untuk melakukan kewajiban. Sehingga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, memang tidak bisa memutuskan untuk menarik diri karena alasan menolak kewajiban untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ketidakungkinan Reservasi maupun Penarikan diri yang beralasan menolak surat perintah penangkapan Putin menyisakan satu solusi agar negara-negara yang menolak tetap dapat menjadi bagian dari Statuta Roma yaitu dengan cara mengajukan amandemen. Amandemen Statuta Roma menjadi penting mengingat sejauh ini ICC

330 Michael Engelbert Theis, 2020, *Reservasi Pan America System (PAN) Menurut Hukum Perjanjian Internasional*, Lex Privatum, Vol. 8, No. 3, hlm. 119.

331 Pasal 120 Statuta Roma 1998.

telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada 3 kepala negara yang mana dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena adanya penolakan atau ketidakmampuan negara anggota ICC untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 86. Sehingga, dengan dilakukannya amandemen dapat menjadi solusi agar pelaksanaan dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tidak hanya menjadi dokumen yang pelaksanaannya cenderung sulit dilaksanakan khususnya ketika seorang kepala negara yang menjadi subjek daripada surat perintah penangkapan tersebut.

Kemungkinan untuk mengajukan amandemen diatur pada Pasal 121. Amandemen tersebut khususnya berupa pasal tambahan yang mengatur mengenai apabila negara berhadapan dengan kewajiban untuk menangkap seorang kepala negara. Tentunya apabila berbicara mengenai penangkapan seorang kepala negara yang masih menjabat sangat sulit dilakukan oleh sebuah negara, hal ini dikarenakan negara cenderung memiliki hubungan baik ataupun kerjasama internasional yang apabila melaksanakan kewajiban untuk menangkap kepala negara tentu akan menimbulkan masalah lebih lanjut terhadap hubungan baik dengan negara yang kepala negaranya menjadi tersangka oleh ICC. Sehingga pada pelaksanaannya surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada seseorang yang merupakan kepala negara diperlukan pengaturan tambahan di Statuta Roma mengenai bagaimana pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut. Dengan dilakukan amandemen yang mengatur lebih lanjut kondisi khusus dimana tersangka yang ditetapkan ICC adalah seorang kepala negara, tentu hal ini dapat menjadi solusi bagi negara anggota yang merasa tidak mampu untuk melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

6. Keabsahan Surat Perintah Penangkapan *International Criminal Court* Dari Aspek Dugaan Kejahatan Perang Terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin menimbulkan perbedaan sikap antar negara di dunia baik negara anggota ICC maupun negara non-anggota. Beberapa negara telah menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut, namun ada juga sejumlah negara yang mengkritik bahkan menyatakan

dengan tegas tidak akan menangkap Presiden Vladimir Putin meskipun negara tersebut adalah negara anggota ICC. Penolakan-penolakan dan kritik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan pandangan dan mengingat Rusia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain sehingga dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut cenderung sulit untuk direalisasikan, bahkan beberapa pihak mengatakan dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersebut hanya akan memicu permasalahan yang lebih besar mengingat Rusia juga mengeluarkan ancaman bagi siapa saja yang berani untuk menangkap Presiden Vladimir Putin maka akan berperang dengan Rusia.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada tanggal 17 Maret 2023, surat tersebut bersifat rahasia sehingga hanya bisa dilihat dan diakses oleh pihak-pihak khusus yang memang ditujukan salah satunya negara anggota ICC. Pasal 58 Statuta Roma menjadi dasar bagi ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, setidaknya ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada seseorang apabila:

- a. Penuntut Umum yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus telah memiliki keyakinan dan alasan yang kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan paling serius yang menjadi yurisdiksi ICC;
- b. Penuntut Umum merasa bahwa adanya kepentingan dan keharusan ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan tersebut.

Berdasarkan dua syarat diatas, maka dalam hal ini pengeluaran surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin memang dapat dikeluarkan karena berdasarkan pernyataan Penuntut Umum yang menangani kasus atau situasi di Ukraina yaitu Karim A.A Khan menyatakan keyakinannya dan kantornya apabila ada alasan yang masuk akal bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin perlu ditangkap dan diadili oleh ICC atas dugaan deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal.³³²

332 <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin> , diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 11.59 WIB.

Surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin yang dikeluarkan oleh ICC tidak dapat diakses dan dilihat bagaimana isi dari surat tersebut karena sifatnya yang rahasia, namun dalam menganalisis apakah surat tersebut sah dapat dilakukan dengan melihat aspek dugaan kejahatan yang dilakukan, yaitu dugaan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.

Pertama, apa yang menyebabkan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Berdasarkan keterangan pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada 17 Maret 2023, Presiden Putin diduga telah melakukan kejahatan perang berupa deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal. Sebelumnya, perlu diketahui Rusia bukanlah negara anggota ICC karena tidak meratifikasi Statuta Roma, namun dikarenakan kasus tersebut melibatkan Ukraina yang telah menyerahkan yurisdiksinya kepada ICC berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, maka kasus tersebut memang dapat diadili oleh ICC. Selain itu kasus tersebut dirujuk oleh 43 negara pihak melalui surat rujukan yang pada pokoknya meminta ICC untuk melakukan investigasi terhadap situasi di Ukraina. Atas dasar rujukan tersebut, karim A A Khan selaku Jaksa Penuntut Umum memulai investigasi pada tanggal 2 Maret 2022. Posisi kasus yang dirujuk oleh negara pihak tidak memiliki kekuatan yang mewajibkan Rusia untuk menyerahkan Presiden Vladimir Putin. Berbeda apabila kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentu menjadi alasan mengapa bukan Dewan Keamanan PBB yang merujuk situasi di Ukraina melainkan 43 negara anggota ICC, karena tentunya Rusia memiliki hak veto yang dapat membatalkan rujukan tersebut. Sehingga memang pada praktiknya surat perintah penangkapan tersebut sulit untuk dilaksanakan selama Rusia masih menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB.

Kedua, setelah mengetahui apa dasar ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan, selanjutnya menganalisis apakah dugaan deportasi anak-anak di Ukraina benar-benar terjadi. Berdasarkan laporan oleh Komisi Penyelidik Internasional Independen tentang Ukraina No A/HRC/52/62 yakni sebuah komisi khusus yang dibentuk oleh HRC yang ditugaskan untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia selama masa invasi yang terjadi di wilayah pendudukan.

Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan sejak tanggal 24 Februari 2022 Pemerintah Rusia telah melakukan pemindahan atau deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal. Jumlah anak-anak yang dideportasi tersebut tidak dapat dipastikan secara tepat, namun berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah Ukraina per tanggal 30 April 2023 adalah sebanyak 19.393 anak. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Putin pada 30 Mei 2022 yang mempermudah anak-anak tersebut untuk mendapat kewarganegaraan Rusia sehingga memperkuat dugaan bahwa anak-anak yang dipindahkan ke wilayah Rusia juga diberikan kewarganegaraan Rusia.

Berdasarkan klaim Pemerintah Ukraina dan adanya laporan dari badan yang dibentuk oleh HRC maka hal tersebut memperkuat adanya dugaan deportasi anak secara ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia khususnya Presiden Vladimir Putin. Tentunya tindakan memindahkan anak-anak secara paksa dan memberikan kewarganegaraan lain adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Khususnya pada Statuta Roma yang melarang tindakan deportasi anak-anak ke wilayah lain pada masa perang sebagaimana ketentuan Pasal 8 (2) (a) (vii). Sehingga tindakan Pemerintah Rusia telah melanggar ketentuan dan memang menjadi dasar hukum bagi ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Meskipun surat tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Statuta Roma dan ICC telah memiliki bukti dan keyakinan kuat untuk dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin, terdapat hal yang sebenarnya sangat disayangkan yaitu ICC terlalu cepat mengeluarkan surat perintah penangkapan, hal tersebut dikarenakan meskipun ICC memiliki cukup bukti dan keyakinan, pihak Rusia berencana untuk menjelaskan duduk perkara mengenai dugaan deportasi anak yang terjadi. Melalui pernyataan yang disampaikan pihak Rusia juga menyatakan penolakan atas surat perintah penangkapan tersebut dan juga menyatakan deportasi anak tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak yang tinggal di wilayah pendudukan menjadi korban perang. Berdasarkan pernyataan Pihak Rusia Vassily Nebenzia selaku Duta Besar Rusia untuk PBB, Rusia telah berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai anak-anak di Ukraina pada awal bulan

April, namun sebelum forum tersebut dapat terlaksana ICC sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penangkapan.³³³

Pernyataan Pemerintah Rusia yang menyatakan tindakan deportasi atau pemindahan anak-anak Ukraina tersebut dilakukan untuk mencegah mereka menjadi korban perang meskipun bertujuan baik tentu perlu dilihat lebih lanjut apakah tindakan tersebut dibenarkan mengingat pemindahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pemerintah Ukraina. Pada praktiknya dalam keadaan perang Konvensi Jenewa telah melindungi anak-anak sebagai pihak yang tidak boleh menjadi sasaran militer sehingga perlu dilindungi pada masa perang. Konvensi Jenewa keempat Pasal 49 pada paragraf pertama berbunyi *“Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive”*. Pasal tersebut melarang pihak yang menduduki suatu wilayah pada masa perang untuk melakukan pemindahan penduduk setempat ke negara lain. Pelarangan tersebut memiliki pengecualian sebagaimana paragraf selanjutnya yang berbunyi *“Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected persons outside the bounds of the occupied territory except when for material reasons it is impossible to avoid such displacement. Persons thus evacuated shall be transferred back to their homes as soon as hostilities in the area in question have ceased”*. Berdasarkan pasal tersebut, sebenarnya pemindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia dapat dianggap sebagai hal yang dimungkinkan dan disebut sebagai evakuasi apabila memang bertujuan melindungi anak-anak dari area perang, sehingga rencana Rusia untuk menjelaskan duduk perkara mengenai pemindahan anak-anak tersebut tentunya dapat memperjelas keadaan dan apabila memang tujuannya untuk melindungi anak-anak tersebut, seharusnya dapat diselesaikan melalui diplomasi dengan melakukan kesepakatan terkait nasib anak-anak tersebut dan kapan anak-anak tersebut dipulangkan atau bahkan dapat membuat Rusia pada akhirnya menyerahkan kembali anak-anak tersebut kepada Ukraina.

333 <https://www.voanews.com/a/russia-to-hold-un-meeting-on-ukrainian-children-taken-to-russia/7014223.html> , diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12.06 WIB.

Selanjutnya pasal 49 pada paragraf 4 berbunyi *“The Occupying Power undertaking such transfers or evacuations shall ensure, to the greatest practicable extent, that proper accommodation is provided to receive the protected persons, that the removals are effected in satisfactory conditions of hygiene, health, safety and nutrition, and that members of the same family are not separated”*. Berdasarkan pasal tersebut meskipun pemindahan dengan alasan keamanan anak-anak merupakan alasan Pemerintah Rusia yang memang di mungkinkan berdasarkan paragraf sebelumnya, namun adanya pemisahan antara anak-anak dengan anggota keluarga menjadi hal yang dilanggar oleh Pemerintah Rusia. Seharusnya apabila tujuan Rusia melakukan pemindahan anak tersebut karena tidak ingin mereka menjadi korban perang tetaplah harus berkomitmen pada Konvensi Jenewa keempat khususnya pada pasal 49. Khususnya tidak memisahkan anak-anak dengan keluarga mereka dan pemindahan itu juga harus memiliki persetujuan dari Pemerintah Ukraina sebagai negara asal yang memiliki kedaulatan atas warga negaranya.

Dalam hal ini dikarenakan Ukraina masih menjadi negara berdaulat dan merdeka seharusnya pemerintah Rusia tidak melakukan pemindahan anak-anak Ukraina tanpa persetujuan dari pemerintah Ukraina, sehingga diperlukan diplomasi yang menyepakati pemindahan tersebut dan sebaiknya dipindahkan ke wilayah Ukraina yang tidak termasuk wilayah invasi sehingga pemerintah ukraina juga dapat memastikan keadaan dan keselamatan dari anak-anak tersebut. Sehingga memang seharusnya sebelum dikeluarkannya surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, ICC terlebih dahulu menanggapi keinginan Rusia untuk menjelaskan duduk perkara mengenai alasan Rusia memindahkan anak-anak tersebut dan kapan anak-anak tersebut akan dikembalikan. Karena apabila forum tersebut terlaksana tentunya akan ada peluang terjadi kesepakatan antara kedua negara terkait anak-anak tersebut.

Surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin pada akhirnya menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena dari Pemerintah Rusia sendiri melakukan penolakan bahkan ancaman serius bagi siapa saja yang berani menangkap Presiden Vladimir Putin. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan menghentikan tindakan Rusia diperlukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB, dan sudah

seharusnya Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak melanggar tujuan perdamaian dunia sebagaimana yang disepakati dalam piagam PBB. Sehingga perlu adanya pembatasan terhadap Rusia yang salah satunya dapat dengan melakukan embargo perdagangan atau ekonomi yang harus menjadi komitmen setiap anggota PBB dengan harapan dapat meredam bahkan menyebabkan Rusia tunduk dan menghentikan tindakannya serta mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana ketentuan hukum internasional.

D. Kesimpulan

Pasal 86 Statuta Roma memiliki implikasi terhadap kewajiban negara anggota karena pasal tersebut secara eksplisit telah memberikan kewajiban bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Segala bentuk penolakan terhadap surat tersebut yang bukan beralasan karena keamanan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 72 Statuta Roma tidak dapat diterima dan apabila anggota ICC tidak menangkap Presiden Vladimir Putin ketika berada di wilayahnya maka hal tersebut merupakan bentuk kegagalan sebagaimana yang diatur pada pasal 87 ayat (7) Statuta Roma.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC kepada Presiden Rusia Vladimir Putin telah sesuai karena telah memenuhi syarat dikeluarkannya surat berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma yang mana dengan dikeluarkannya surat tersebut merupakan cara ICC melakukan proses penuntutan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin khususnya dari aspek dugaan deportasi atau pemindahan anak-anak di Ukraina secara ilegal. Berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Ukraina dan adanya laporan dari lembaga yang dibentuk oleh HRC memperkuat dugaan tersebut sehingga menjadi dasar yang cukup untuk ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan. Alasan Rusia yang menyatakan pemindahan anak-anak tersebut bertujuan untuk mencegah mereka menjadi korban perang sebenarnya dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Konvensi Jenewa keempat, namun pasal tersebut juga menyebutkan bahwa tidak boleh ada pemisahan keluarga, hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran yang juga dilakukan karena anak-anak yang diduga dipindahkan juga dipisahkan dengan orangtua mereka.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman. (2017). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Juwana, Hikmahanto. (2005). Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*, 8(11), 70-71.
- Koalisi Masyarakat untuk Mahkamah Pidana Internasional. (2008). *Kertas Kerja Indonesia menuju Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional*.
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

2. Jurnal

- Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*. 2(3), 228.
- Latifah, Marfuatul. (2014). Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia. *Politica*, 5(2), 159.
- Ramdani, Varda Oktavia, et al. (2022). Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 81.
- Mirwanto, Tony. (2020). Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Abdimas Imigrasi*. 1(2), 83.
- Prasatya, Didi. (2013). Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1.
- Theis, Michael Engelbert. (2020). Reservasi Pan America System (PAN) Menurut Hukum Perjanjian Internasional. *Lex Privatum*, 8(3), 119.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Decree of the President of the Russian Federation of 30 May 2022 No. 330 on Amendments to the Decree of the President of the Russian Federation dated 24 April 2019, No. 183 On Determining for Humanitarian Purposes the Categories of Persons Entitled to Apply for Citizenship of the Russian Federation in a Simplified Manner, article 1.

Rome Statute 1998

4. Sumber Internet

<https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine> , Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.30 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64998316>, Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.39 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230326070811-134-929376/daftar-anggota-icc-yang-bersedia-dan-tidak-untuk-tangkap-putin> , Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.47 WIB.

<https://asp.icc-cpi.int/states-parties> , diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 11.26 WIB.

https://www-icc--cpi-int.translate.googleusercontent.com/situations/ukraine?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc , diakses pada tanggal 30 april 2023 pukul 15.14 WIB.

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/president-human-rights-council-appoints-members-investigative-body-ukraine> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 10.46 WIB.

<https://childrenofwar.gov.ua> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 11.03 WIB

<https://www.voaindonesia.com/a/rusia-akan-gelar-pertemuan-pbb-untuk-bahas-anak-anak-ukraina-yang-dibawa-ke-rusia/7014204.html> , diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 16.24 WIB.

https://www-reuters-com.translate.googleusercontent.com/world/europe/who-are-ukrainian-children-heart-putin-arrest-warrant-2023-03-19/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 10.36.

<https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine> , diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 14.50 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=6BUGwtvbqVY> , diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 15.50 WIB.

<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 11.34 WIB.

<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin> , diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 11.59 WIB.

<https://www.voanews.com/a/russia-to-hold-un-meeting-on-ukrainian-children-taken-to-russia/7014223.html> , diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 12.06 WIB.

5. Terbitan Lembaga

Human Rights Council, 2023, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine*, hlm. 2.